

DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL DALAM PEMILUKADA BIMA 2010*

Septi Satriani

Abstract

This study examines local power dimension described through elite contestation in 2010 local elections in Bima. The local elections has become medium to portrait local elites struggle to get victory. Reflecting on Leo Agustino, the downshift of political space inside out has affected democratic process at local level. The emergence of democratic paradox in some local elections in all places in Indonesia was an effect of choice to downshift the political space. Early assumption of this downshift is recognition of citizen's rights to participate in electing their leader. However, in reality, this recognition could not guarantee quality of the leader. When victory become ultimate goal, the process tend to be marginalized, therefore. This is happened in 2010 local elections in Bima. This study try to show how local elite run local elections as part of democracy with undemocratic means.

Keywords: Bima, democracy, local elections, local elite

Abstrak

Kajian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukada Bima 2010. Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya. Meminjam istilah Leo Agustino,** pergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal. Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir seluruh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut. Asumsi awal yang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukan pemimpinnya. Namun dalam kenyataannya, ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan. Hal inilah yang terjadi pada pemilukada Bima 2010. Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukada sebagai bagian dari demokrasi dengan cara-cara yang justru tidak demokratis.

Kata kunci: Bima, demokrasi, pemilukada, elite lokal

Pengantar

Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Salah satunya melalui pemilukada. Pemilukada dianggap sebagai sebuah medium untuk menghasilkan kepemimpinan yang demokratis di tingkat lokal. Logikanya sederhana. Melalui pemilukada, masyarakat diberi hak untuk ikut menentukan pemimpinnya dan harapan-

nya bahwa pemimpin yang dihasilkan dari pemilukada adalah pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat.

Pemilukada sebagai sebuah alat untuk menentukan pemimpin di tingkat lokal baru dilaksanakan sekitar tahun 2005.¹ Alat ini dipilih untuk menggantikan sistem pemilihan kepala daerah lama yang dianggap tidak 'demokratis'. Sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)² sebagai

* Penelitian ini dilakukan oleh Septi Satriani, S.IP. (koordinator) dengan anggota Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos, M.A., Yogi Setya Permana, S.IP. dan Pandu Yuhsina Adaba, S.IP.

** Leo Agustino, *Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

¹ Dasar yang digunakan untuk memilih kepala daerah melalui pemilukada adalah bagian kedelapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

² Dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah dan wakil

lembaga yang mewadahi keterwakilan rakyat dikenal hanya sebagai stempel sah dari apa-apa yang telah diusulkan oleh pemerintah pusat (eksekutif/presiden). Alhasil, pemimpin di level daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur dipenuhi oleh para birokrat maupun militer yang dapat memenuhi selera presiden. Akibatnya, ragam politik di tingkat lokal menjadi sangat monoton.

Era ini kemudian mengalami pergeseran dengan jatuhnya Soeharto dari tampuk kepemimpinan pada tahun 1999. Peristiwa jatuhnya Soeharto ini menjadi momentum penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Jika dahulu ragam politik cenderung monoton maka setelah jatuhnya Soeharto, ragam politik tidak lagi monoton malah cenderung amat dinamis dan sulit ditebak kecenderungannya. Indonesia memasuki babak baru kehidupan politik. Babak baru yang dikenal sebagai masa transisi ini dimaknai oleh Guillermo O' Donnell dan Phillippe Schmitter sebagai "selang waktu antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis".³

Selang waktu ini ditandai oleh berbagai hal, termasuk menyurutnya sentralisasi kekuasaan pusat yang melahirkan pilihan proses kekuasaan melalui pemilukada, tidak lagi melalui penunjukan. Pada masa transisi ini, ruang bagi kemunculan elite 'baru' semakin lebar termasuk di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Harapan besar banyak disandarkan dari terbukanya kehidupan politik ini. Keterbukaan diharapkan mampu mendorong kehidupan politik di Indonesia ke arah yang lebih baik dan demokratis. Namun sayang, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masa transisi ini justru dipenuhi oleh manipulasi, pembajakan elite sehingga kemungkinan proses menuju konsolidasi demokrasi seakan sulit untuk diwujudkan.

Melalui pemilukada Kabupaten Bima 2010, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa pemilukada sebagai medium yang diharapkan mampu memenuhi hasrat berdemokrasi, ternyata dalam kenyataannya justru mengalami banyak

distorsi. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa aturan politik dijadikan alat kekuasaan (dibajak) oleh tiap pihak yang berkepentingan dalam politik. Praktik politik uang, politisasi birokrasi, keberpihakan penyelenggara pemilukada hingga politik patronase kental mewarnai pemilukada di Bima ini.

Tulisan ini akan diawali dengan membedah genealogi elite dari masa kesultanan hingga pemilukada Kabupaten Bima 2010 berlangsung. Penulis merasa penting mengangkat genealogi elite sebagai pintu untuk memberikan pemahaman mengenai peta kekuasaan di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Harapannya, ketika peta kekuasaan lokal telah tergambar, maka relasi di antara mereka akan mudah pula untuk dipaparkan. Apakah relasi yang dibangun antar elite-elite lokal yang ada bersifat konfliktual ataukah justru saling menguntungkan? Terakhir tulisan ini akan mencoba merefleksikan bagaimana peran mereka dalam pengaruhnya terhadap demokrasi di tingkat lokal.

Elite Lokal di Bima

Bima yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Kabupaten Bima yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa. Wilayah ini berada pada titik ordinat 118° 44"–119° 22" Bujur Timur dan 08° 08"–08° 57" Lintang Selatan. Kabupaten Bima secara teritorial berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, dengan Selat Sape di Timur, Samudra Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Dompu di sebelah barat. Dengan penduduk 439.228 jiwa pada tahun 2010, Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 168 desa.⁴ Kabupaten Bima kemudian mengalami pemekaran dengan produk Kota Bima pada tanggal 10 April 2002⁵ melalui peraturan Perundang-Undangan No. 13 Tahun 2002.⁶ Meski telah sepuluh tahun pemekaran Kota Bima, namun hingga penulis datang untuk kedua kalinya ke Kabupaten Bima pada tahun 2012,⁷ persoalan 'pembagian' aset antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima belum

Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.

³ Guillermo O'Donnell, Phillippe C. Schmitter, Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi, Tinjauan Berbagai Perspektif* (LP3ES: Jakarta, 1993), hlm. 6.

⁴ Bima dalam Angka 2011.

⁵ <http://bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=6>

⁶ <http://jejakbulikts.com/readnews.php?id=275>

⁷ Penulis mengunjungi Kabupaten Bima pada bulan April–Mei 2011.

juga selesai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kantor pemerintah Kabupaten Bima yang berada di Kota Bima. Pasca-terjadinya pembakaran kantor Bupati Bima pada 26 Januari 2012 pun⁸ kantor Pemda Kabupaten Bima masih berada di Kota Bima sehingga secara politik ‘sulit’ untuk memberi garis tegas arena pertarungan elite antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima.⁹

Selain tidak jelasnya garis demarkasi arena pertarungan elite di kedua wilayah tersebut, faktor sejarah sosial politik yang membentuk karakter ekonomi politik dan kekuasaan di Bima, membuat arena pertarungan elite lokal di keduanya hanya didominasi oleh kelompok elite tertentu.¹⁰

Dalam rentetan sejarah Bima, ada beberapa faktor penanda penting yang memengaruhi kehidupan politik di Bima. Pertama, periode masuknya Islam. Islam masuk diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-17.¹¹ Dalam masa Islam ini pulalah, kehidupan politik dan sosial Bima boleh dibilang relatif mantap.¹² Struktur kekuasaan kerajaan Bima mengalami perubahan dengan masuknya Majelis Agama. Majelis ini memiliki posisi yang ‘sejajar’ dengan Majelis

Tureli¹³ dan Majelis Hadat.¹⁴ Konsekuensinya pemerintahan Raja tidak saja didasarkan pada adat (*hadat*) semata, melainkan juga didasarkan pada ajaran agama Islam (*syara*’).

Dijadikannya syariat Islam dalam struktur pemerintahan Kerajaan Bima dimulai ketika kepemimpinan Sultan Abdul Khair dalam sidang Majelis Paruga Suba¹⁵ memerintahkan untuk memberlakukan syariat Islam bersama-sama dengan hukum adat. Masuknya *syara*’ dalam kehidupan Kerajaan Bima menjadikan Raja Bima tidak saja menjadi sekadar sebagai kepala negara maupun pemerintahan melainkan juga menjadi *qadhi* atau hakim agama yang memutuskan segala perkara menyangkut persoalan agama.¹⁶ Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja

¹³ Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo’ Sangaji Kai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 9–11. Dalam catatan Kerajaan Bima dikatakan bahwa struktur di bawah kesultanan bernama *jeneli tureli* dan *mabumi* tiada boleh sekali-kali dikeluarkan jikalau bukan dengan sepatutnya dikeluarkan, melainkan dia tiada mau bertuan kepada Raja Bima, atau ia meninggalkan Tanah Bima. Struktur ini juga diulas oleh Henri Chambert-Loir dalam bukunya yang berjudul “Syair Kerajaan Bima” bahwa ada dua pengelompokan masyarakat dari atas ke bawah dan mendatar. Pengelompokan pertama dikategorikan sebagai kelompok bangsawan yang dibagi dalam dua tingkat kenengratan, yaitu *Ruma* dan *Rato*. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang masuk dalam kategori bangsawan adalah Sultan dan Raja Bicara, *Tureli* sebagai wakil marga yang pernah bersatu pada dahulu kala untuk mendirikan kerajaan serta *Jeneli* yang bertanggung jawab atas pemerintahan daerah masing-masing *jeneli*. Ulasan dari Henri Chambert-Loir ini menguatkan bahwa *jeneli* dan *tureli* adalah bagian dari Kerajaan Bima yang dulunya merupakan wilayah yang memiliki kekuasaan.

¹⁴ Abdullah Tayeb, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1995), hlm. 178. Majelis Hadat Bima selanjutnya memangku kewenangan dalam pemerintahan sehari-hari memiliki komposisi sebagai berikut: Pertama, Majelis Hadat yang dipimpin oleh Tureli Nggampo dengan 24 orang anggota yang terdiri dari 6 orang Tureli sebagai anggota, 6 orang Jeneli sebagai anggota, dan 12 orang Bumi NaE sebagai anggota. Tureli Nggampo atau koordinator Tureli adalah ketua merangkap hakim kerajaan. Sementara Tureli adalah pemimpin bidang tertentu tugas pemerintahan dan diibaratkan sebagai seorang menteri yang memegang departemen atau kementerian tertentu. Jeneli adalah pejabat penguasa wilayah tertentu. Dalam literatur dijelaskan bahwa posisi Jeneli ibarat camat pada waktu sekarang. Dan Bumi NaE adalah penguasa wilayah di bawah Jeneli. Kedua, Majelis Hadat lengkap yang beranggotakan semua pejabat Hadat termasuk anggota Majelis Hadat dan petugas Hadat dalam istana dari pangkat tertinggi hingga terendah.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 180.

¹⁶ Syamsuddin Haris, dalam Tim Peneliti PPW-LIPI, *Penelitian Wawasan Kebangsaan Indonesia (Tataran Masyarakat)*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1993), hlm. 63.

⁸ <http://nasional.vivanews.com/news/read/283195-motor-wartawan-dibakar-demonstran-di-bima>

⁹ Berdasarkan wawancara dengan narasumber seorang pemimpin redaksi salah satu media cetak lokal dan anggota DPRD Kabupaten Bima dikatakan bahwa mereka yang maju mencalonkan diri untuk menjadi Bupati maupun wali kota di Bima adalah orang-orang yang sama. Zaenul Arifin yang pernah menjabat menjadi Bupati Kabupaten Bima 2005 pernah maju pada pemilukada Kota Bima 2008.

¹⁰ Septi Satriani dkk., *Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima 2010*, (Jakarta: LIPI Press, 2012). Dalam buku ini, tim telah menggambarkan peta genealogi elite lokal yang ada di Bima (kabupaten dan kota).

¹¹ Henri Chambert-Loir dkk., *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*, (Jakarta: KGP, 2010), hlm 14.

¹² *Ibid.*, hlm 14. Kategori kemantapan diukur dari relatif tidak adanya gejolak di Bima. Meski pada awal proses Islamisasi, Bima mengalami pergolakan namun akhirnya Islam cenderung bisa ‘melebur’ di Bima.

dibantu oleh tiga majelis, yaitu Majelis Tureli yang melaksanakan kehidupan sehari-hari, Majelis Hadat yang berisi pejabat-pejabat istana yang dikepalai oleh kepala Hadat bergelar Bumi Luma RasanaE¹⁷ dan Majelis Agama yang dikepalai oleh *Qadhi* atau Imam Kerajaan.¹⁸

Masa kesultanan atau masa Islam masuk secara politik dalam struktur kekuasaan Kerajaan Bima menjadi dasar bagi kehidupan politik Bima pada masa-masa setelahnya. Struktur inilah yang akhirnya memberi warna kehidupan politik di Bima hingga sekarang. Kekuasaan Kesultanan Bima yang didasarkan pada tiga pilar (dua menurut analisis penulis karena majelis *Tureli* dan majelis *Hadat* bisa digolongkan pada satu pilar, yaitu bangsawan), yaitu Majelis *Tureli*, Majelis *Hadat* dan Majelis *Syara'* menjadi dasar pembelahan masyarakat elite ke dalam dua kategori, yaitu elite bangsawan dan elite agama.

Penanda sejarah kedua adalah proses integrasi Bima ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam catatan sejarah, struktur kekuasaan Kesultanan Bima di atas harus mengalami penyesuaian terutama ketika sistem birokrasi modern sebagai kebijakan pemerintah pusat harus dijalankan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Apalagi pengadopsian struktur baru dalam struktur lama memicu keinginan dari kalangan elite bangsawan untuk mendapatkan keistimewaan dalam struktur pemerintahan modern di tahun 1950-an.¹⁹ Pada tahun 1950–1967 Putra Abdul Kahir, putra mahkota Kesultanan Bima sekaligus anak dari Sultan R. Salahudin duduk menjadi kepala daerah Bima.²⁰ Duduknya Sultan R. Salahudin menjadi kepala daerah Bima dibaca sebagai bagian dari memenuhi tuntutan keistimewaan tersebut. Hal ini kemudian memicu pertentangan dari masyarakat yang disuarakan

melalui demonstrasi oleh kaum yang mengatasnamakan sebagai kaum pergerakan.

Peristiwa politik ini membawa implikasi terbelahnya masyarakat ke dalam dua kubu yang percaya terhadap pemerintah dan yang tidak percaya pada pemerintah.²¹ Golongan pertama ditokohi oleh kalangan birokrasi-bangsawan dan golongan kedua diperankan oleh para mubaligh dan ulama dari kalangan modernis Islam terutama Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis).²² Pembelahan ini semakin mempertajam dikotomi antara elite bangsawan dan elite agama. Faktor inilah yang menjadi salah satu pemicu pembelahan masyarakat elite ini semakin kentara terlihat. Pergeseran peran kepemimpinan kesultanan di satu sisi dan diambilalihnya mekanisme kepemimpinan di Bima oleh pemerintah RI (Republik Indonesia) membuat absennya figur penyeimbang di antara pilar-pilar kekuasaan yang ada di Bima.

Ketika Indonesia memasuki periode kepemimpinan di bawah Soeharto, baik elite bangsawan maupun elite agama sama-sama mengalami 'peminggiran'. Pasca-pemberlakuan kebijakan stabilitas politik oleh Pemerintah Orde Baru, kehidupan politik di Bima sarat dengan kepentingan pusat. Hal ini memunculkan resistensi. Resistensi atas dominasi militer dan birokrasi dalam politik Bima ini sering mengemuka dalam berbagai peristiwa politik yang ada.

Pertama, peristiwa protes massa pada 1970 yang dilakukan oleh masyarakat Donggo. Mereka menuntut mundur Bupati Letkol Suharmaji dan mengangkat kembali Putra Abdul Kahir sebagai Bupati Bima.²³ Resistensi lain terlihat pada kasus kemenangan PPP pada pemilu 1977. Kemenangan ini cukup mengejutkan pemerintah

¹⁷ Huruf E besar tersebut adalah cara penulisan yang tertera dalam naskah Bo' Sangaji Kai.

¹⁸ Ahmad Amin, "Sedjarah Bima" dalam Tim Peneliti PPW-LIPI, *Penelitian Wawasan Kebangsaan Indonesia (Tataran Masyarakat)*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1993), hlm. 63.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁰ Syamsul Hadi Thubany, *Pemilukada Bima 2005: Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia*, (NTB: Bina Swagiri-Fitra Tuban-Solud NTB Kemitraan, 2005)

²¹ Syamsudin Haris, *op.cit.*, hlm. 66.

²² *Ibid.*, hlm. 67.

²³ Wawancara Septi Satriani dengan Farouk Muhammad (18 Februari 2011). Meskipun di awal kepemimpinan Putra Abdul Kahir ada kelompok yang tidak senang dan menganggap kepemimpinan Sultan sebagai pemberian keistimewaan pada bangsawan, tetapi masyarakat merasa bahwa simbol pemersatu Bima ada pada diri kesultanan. Pada saat sekarang masih banyak masyarakat yang menaruh hormat kepada keluarga kesultanan terutama yang masih memiliki ikatan emosional dengan pihak kerajaan. Lihat hasil laporan tim yang ditulis Septi Satriani dkk., *Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima 2010*, (Jakarta; LIPI Press, 2011), dalam proses pencetakan.

pusat²⁴ karena ketika kebijakan politik *floating mass* telah diterapkan, Golkar tetap mengalami kekalahan.²⁵

Kedua peristiwa ini membuat pemerintah pusat lebih memilih jalan represif untuk memenangkan kontestasi politik dan melanggengkan kekuasaannya. Pilihan kebijakan represif diskenariokan melalui peristiwa 'Kulit Babi'. Insiden ini bermula dari ditaruhnya kulit babi ke dalam suatu masjid oleh anak kecil suruhan seorang perwira militer lokal.²⁶ Hal ini memancing kerusuhan yang bermuara pada dibakarnya gereja oleh massa. Kerusuhan ini melegitimasi pilihan kebijakan represif oleh pemerintah pusat untuk mengukuhkan dominasinya di Bima.²⁷ Setelah peristiwa itu maka 'kuningisasi' di Bima menjadi tidak terelakkan. Banyak dari para elite bangsawan dan agama di Bima kemudian bergabung dengan Golkar.²⁸ Peristiwa ini menjadi penanda sejarah ketiga.

Kuningisasi yang tidak terelakkan di Bima menyisakan karakter yang cukup kuat dalam kehidupan politik di Bima, yaitu masih bertahannya dominasi elite Golkar (yang pernah dan atau masih di Partai Golkar) serta kuatnya jaringan kekerabatan yang menjadi mesin operasi elite lokal. Keduanya banyak mewarnai kehidupan politik di Bima. Golkar hingga tulisan ini dibuat masih mendominasi perolehan kursi di DPRD Bima. Pada tahun 1999 Golkar mampu memperoleh 21 dari 45 kursi di DPRD Bima atau sekitar 46,67%.²⁹ Perolehan kursi ini relatif stabil karena pada pemilu legislatif 2004 Golkar masih

mengantongi 17,5% suara atau 7 kursi dan tahun 2009 memperoleh 19,5% atau 8 kursi.³⁰

Dalam praktik kekuasaan di Bima, dominasi Golkar ini bertali-temali dengan politik kekerabatan yang tercermin dalam figur Putra Abdul Kahir H. Abidin dan H. Adenan.³¹ Dua nama terakhir adalah kakak-beradik yang menguasai peternakan dan jasa konstruksi bangunan. Keduanya mewakili kaum ulama/pengusaha. Sementara Putra Abdul Kahir yang mewakili kaum bangsawan memiliki empat orang anak satu di antaranya meninggal karena kecelakaan.³² Ketiga yang lainnya adalah Ferry Zulkarnaen yang sekarang menjabat menjadi Bupati Kabupaten Bima, Fera yang menjabat menjadi Ketua DPRD Kota Bima dan Ade yang duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2009–2014.

Haji Adenan memiliki anak H. Arifin yang merupakan orang tua dari Ady Mahyudi. Ia adalah salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2009–2014 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ady Mahyudi kemudian menikah dengan salah satu kerabat dari Haji Abidin.

Haji Abidin memiliki beberapa anak dari dua istri antara lain H. Qurais H. Abidin, H. Arrahman H. Abidin, Hj Siti Sundari, Mawarni, dan Andang Abidin. H. Qurais H. Abidin dan H. Arrahman H. Abidin adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bima periode 2008–2013. H. Qurais H. Abidin menjadi Wali Kota Kota Bima pada tahun 2010 ketika Drs. H.M. Nur A. Latif wali kota yang menjadi pasangannya pada pemilukada 2008 wafat pada 6 Maret 2010. Drs. H.M. Nur A. Latif pernah menjabat menjadi Wali Kota Bima pada tahun 2003–2005 berpasangan dengan H. Umar Abubakar Husen.

²⁴ Wawancara Septi Satriani dengan Farouk Muhammad (18 Februari 2011).

²⁵ Syamsudin Haris, *op.cit.*, hlm. 67. Resistensi dan keberanian masyarakat Bima melawan dominasi kekuasaan pusat ditegaskan kemudian dengan kekalahan M. Tohir (kandidat utama Bupati Bima dari pemerintah pusat) dalam pengambilan suara di tingkat DPRD Kabupaten Bima. M. Tohir kalah suara dari Muhidin Azis. Akhirnya kedua orang tersebut tidak ada yang menjadi bupati. Pemerintah pusat kemudian menunjuk Mayor Umar Haroen sebagai Bupati Bima.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 67

²⁷ Wawancara Septi Satriani dengan Farouk Muhammad (18 Februari 2011) dan Syamsuddin Haris (25 November 2011)

²⁸ Syamsuddin Haris (Ed.), *op.cit.*, hlm. 13.

²⁹ KPUD Kabupaten Bima.

³⁰ KPUD Kabupaten Bima.

³¹ Penulis akui bahwa minimnya data membuat penulis kesulitan untuk melengkapi detail-detailnya. Mungkin melalui penelitian lebih lanjut nama-nama yang boleh dibilang menonjol ini bisa dikaji lebih lengkap.

³² Wawancara Yogi Setya Permana, Pandu Yuhsina Adaba, dan Septi Satriani dengan ketua komunitas generasi muda 'terdidik' di Kabupaten Bima, 1 Mei 2011. Berdasarkan penuturan narasumber kecelakaan diindikasikan karena yang bersangkutan sedang mabuk berat padahal sebenarnya di tangan beliaulah tadinya tahta kesultanan akan diwariskan hingga muncul rumor bahwa kematian sang kakak adalah bagian dari skenario perebutan tahta meski rumor tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya hingga penelitian ini dilakukan.

Hj. Siti Sundari anak dari H. Abidin yang merupakan pengusaha jasa perhotelan di Kabupaten Bima menikah dengan salah satu anak keluarga Haji Abd. Rahman Idris (Haris), yaitu H. Abd. Rahim Haris. H. Abd. Rahim Haris merupakan mantan Ketua PBB cabang Kabupaten Bima, ketua MUI Kabupaten Bima serta Ketua Yayasan Islam yang mengelola tanah wakaf milik kesultanan yang merupakan kelanjutan dari Mahkhamatul Syariah (lembaga Syara' pada masa kesultanan). Salah satu adiknya yang berasal dari lain ibu adalah Prof. Dr. H. Syamsuddin Haris adalah ilmuwan sekaligus pengamat politik terkemuka di Jakarta.

Terakhir Andang Abidin adalah ketua tim sukses dari pasangan Zaenul Arifin mantan Bupati Kabupaten Bima 2003–2005 dengan Usman AK mantan wakil Bupati Bima 2005 yang berpasangan dengan Ferry Zulkarnain. Hubungan yang dijalin antara keluarga H. Abidin yang bergerak dalam jasa konstruksi bangunan di Kabupaten Bima dengan keluarga H. Adenan melalui Ady Mahyudi, anggota DPRD Kabupaten Bima sekaligus Ketua Gapensi Kabupaten Bima, adalah bagian dari usaha membentuk blok tandingan jasa konstruksi yang dibangun oleh keluarga Ferry dan kroninya.

Meskipun Pemilu 2010 diikuti oleh empat calon pasangan bupati dan wakil bupati, yaitu *incumbent* bupati pada periode sebelumnya, yaitu H. Ferry Zulkarnain, S.T. dan Drs. H. Syafrudin M. Nur; Drs. H. Suhaedin Abdullah, M.M. dan Drs. Sukirman Azis, S.H.; Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. H. Usman A.K. serta Drs. H. Nadjib H.M. Ali dan Arie Wiryawan, S.E., namun pertarungan politik yang dibangun di antara keempatnya tidak lepas dari persaingan politik kekerabatan yang telah ada dan beranak-pinak di Bima.

Relasi Antarelite di Bima

Ada perdebatan panjang dalam ilmu politik mengenai mana yang lebih penting dalam menentukan kebijakan dan tindakan dalam suatu sistem, apakah lebih penting struktur yang mbingkai dan mengarahkan tindakan tokoh-tokoh yang berada di dalamnya sehingga suatu struktur tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu, atau justru yang lebih menentukan adalah peranan

agency atau karakter dan perilaku tokoh-tokoh kunci yang mewarnai setiap kebijakan strategis.³³ Berangkat dari perdebatan inilah, bagian ini ingin melihat bahwa dinamika yang terjadi dalam peran elite lokal di Bima tidak lepas dari hubungan timbal balik yang terjadi antara perubahan struktur³⁴ maupun perubahan pola tingkah aktor sebagai manifestasi terhadap perubahan tersebut.

Memahami relasi elite dalam konteks pemilukada Bima 2010 tidak dapat lepas dari aspek sejarah seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Bagaimana sejarah elite Bima ini kemudian berpengaruh pada struktur yang melandasi kompetisi elite di masa ini. Struktur ini semakin menemukan momentumnya ketika berada dalam ruang desentralisasi di mana kompetisi kekuasaan lokal tampak lebih bebas dan blak-blakan. Jika ruang politik kekuasaan di tingkat lokal dahulu ditentukan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan wakil rakyat maka tidak demikian dengan masa kini. Jumlah pemilih pada pemilukada Bima 2010 sebanyak 257.070³⁵ kemudian diperebutkan oleh elite-elite yang berkompetisi. Pemilih diletakkan sebagai pasar yang diperebutkan oleh elite yang ada. Dengan demikian, mau tidak mau elite lokal harus mampu mengemas diri seindah mungkin agar laku di mata pemilih sebagai pasarnya.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak popularitas elite politik yang bersaing dalam pemilukada Bima 2010 karena hal ini diyakini memiliki efek positif terhadap suara pemilih. Politik luar ruangan ini membuat elite harus mengerahkan segala daya upaya untuk dapat merebut hati rakyat. Dari cara yang paling halus, penuh tekanan hingga yang paling manipulatif sekalipun. Intinya tidak saja membangkitkan kesadaran masyarakat pada lokal elite tertentu, tetapi kemenangan.

³³ Dewi Fortuna Anwar, "Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Mendorong dan Menghambat Demokratisasi" dalam R. Siti Zuhro (Ed.), *Peran Aktor dalam Demokratisasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. xvii.

³⁴ Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan struktur dibahas lebih jauh dalam pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam hasil penelitian tim yang terdiri dari Septi Satriani dkk., *Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus di Sumbawa*, (Jakarta: LIPI Press, 2010).

³⁵ Lihat laporan penelitian tim tahun 2011 dengan judul "Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima 2010".

Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh elite-elite yang berkompetisi termasuk Ferry Zulkarnaen. Posisinya sebagai elite lokal dalam Pemilu 2010 cukup menguntungkan. Selain mewarisi keturunan darah bangsawan dari Bani Khair, dia juga adalah bupati *petahana*. Posisinya di pemerintahan memberi keleluasaannya untuk bertindak atas nama pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah posisinya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar, yang membawa keuntungan minimal ketersediaan mesin politik bagi kemenangannya. Bilangan strategi *patgulipat* yang dilakukan Ferry untuk meraih kemenangan di pemilu 2010 kali ini cukup banyak. Posisinya sebagai *jenateke* (putra mahkota), bupati *petahana*, dan ketua DPD II Partai Golkar digunakannya untuk membajak aturan politik yang ada. Akibatnya hampir semua elemen demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu 2010 larut bermain dalam pusaran yang dibikin olehnya.

Praktik *money politics* yang identik terjadi di hampir seluruh penyelenggaraan pemilu di Indonesia³⁶ dengan mudah ditemukan di Bima. Hal ini terbukti pada kasus yang menyeret tim sukses Fersy, Suaeb Husein, hingga di meja pengadilan negeri Raba Bima. Sayangnya vonis yang dijatuhkan majelis hakim dengan nomor 300/PID.B/2010/PN. RBI³⁷ ini tidak mampu membatalkan keputusan KPUD Bima kepada Fersy sebagai calon terpilih dalam pemilu 2010. Keberpihakan penyelenggara pemilu,³⁸ pengadilan negeri hingga DPRD dalam kasus ini membuat Fersy tetap dilantik sebagai bupati terpilih periode 2010–2015 pada tanggal 9 Agustus 2010. Akibatnya, pelantikan bupati dan wakil bupati ini mengalami banyak resistensi dan kericuhan.³⁹

Keberpihakan penyelenggara pemilu dikaitkan dengan adanya SK-02⁴⁰ yang kemudian dijadikan alibi oleh Tim Fersy untuk ‘membebaskan’ pasangan Fersy dari kasus ini.⁴¹ Surat itu sengaja dikeluarkan untuk merevisi keanggotaan Tim Pemenangan Fersy dengan mencoret nama Suaeb Husein dari daftar tim tersebut. SK-02 ini tidak pernah masuk dalam rapat-rapat KPUD Bima. Satu-satunya pihak yang mengetahui keberadaan SK tersebut adalah Syaiful Irfan (anggota KPU Bima) yang belakangan diketahui sebagai ipar dari wakil bupati terpilih periode 2010–2015 Drs. H. Syafrudin M. Nur. Sementara duduknya Syaiful Irfan menjadi anggota KPUD tidak lepas dari peran DPRD yang mayoritas diisi oleh partai berlambang beringin.

Keberpihakan pengadilan negeri tercermin dalam surat jawaban yang diberikan PN Raba kepada KPUD bahwa keputusan atas Suaeb Husein belum berkeputusan hukum tetap sebelum tujuh hari. Padahal, jika mengacu pada peraturan yang ada seharusnya telah inkrah ataupun belum keputusan tersebut tetap dapat digunakan untuk membatalkan calon terpilih.⁴² Ada kesan KPUD dan DPRD berlomba dengan waktu inkrah untuk tetap melayangkan surat permohonan pelantikan calon terpilih menjadi bupati kepada gubernur. Ini yang menjadi catatan bahwa salah satu kelemahan pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah bahwa proses penahapan pemilu tetap dapat dilanjutkan meski proses pengadilan sedang berjalan.

Persoalan lain yang melibatkan penyelenggara pemilu dan dua elite lokal lain yang ikut mencalonkan diri dalam pemilu di Bima adalah soal ijazah palsu. Ijazah SMA yang dikantongi oleh Ferry disinyalir palsu. Isu yang

⁴⁰ SK-02 ini merevisi Keanggotaan Tim Pemenangan Ferry. Menurut beberapa narasumber, SK-02 dibuat tertanggal 17 Maret 2010. Penulis belum berhasil mendapatkan salinan SK-02.

⁴¹ Wawancara dengan Anwar (anggota DPRD Kab. Bima) dan Rafiddin (Pemred *Harian Suara Mandiri*) serta informasi dari Pemred Koran Stabilitas. Pada prinsipnya hampir semua narasumber (kecuali yang berasal dari Tim Fersy) yang berhasil diwawancarai menganggap SK 02 hanya akal-akalan Tim Fersy semata.

⁴² Dalam Peraturan Perundang-undangan No. 32 Pasal 82 ayat (2), Jo. Pasal 50 Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010, pasangan calon ataupun tim pemenangnya yang terbukti melakukan *money politics* dapat dibatalkan kedudukannya sebagai calon.

³⁶ Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*, (Stanford California: Stanford Press, 2010), hlm 121–122. Marcus Mietzer, “Funding Pemilu: Illegal Campaign Financing in Indonesia’s Local Elections”, dalam Edward Aspinall dan Gerry Van Klinken, *The State and Illegality in Indonesia*, (Leiden: KITLV, 2011), hlm. 123–138.

³⁷ KPUD Kabupaten Bima.

³⁸ <http://mediagardaasakota.blogspot.com/2011/07/massa-djissam-su-gelar-aksi-keiling.html>.

³⁹ <http://tv.liputan6.com/main/read/6/1035332>. http://berita.liputan6.com/read/290448/pelantikan_bupati_bima_ricuh.

digulirkan oleh Sukirman Aziz⁴³ justru menjadi bumerang bagi sang *whistle blower* ini. Momen yang dipilih olehnya untuk mengungkap soal ini dianggap tidak pas. Sebagai mantan penyelenggara pemilukada 2005 seharusnya dia sudah mengetahui hal ini sejak dulu. Dengan demikian, tuduhan adanya kepentingan sebagai kompetitor Ferry justru dia peroleh manakala dia memilih menghembuskannya pada pemilukada 2010

Keberadaan ijazah palsu ini tidak lepas dari peran Haji Najib sebagai suksesor Ferry di tahun 2005. Politisi kawakan Golkar yang memilih hijrah ke Hanura ini dahulu adalah ‘teman dekat’ Ferry. Namun, kekecewaan atas tender sarang burung walet yang tidak jatuh ke tangannya membuat dia memilih berseberangan dengan Ferry. Nama lain yang ikut berkontribusi atas lolosnya ijazah palsu adalah Ichwan P. Syamsuddin. Dia adalah ketua KPU Bima yang ditugasi melakukan verifikasi terhadap ijazah Ferry. Selain itu, Ichwan P. Syamsuddin belakangan diketahui terdaftar sebagai pegawai honorer di pemerintahan daerah.⁴⁴ Posisinya sebagai pemilik saham terbesar dari Suara Mandiri dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah membawa kedekatan tersendiri dengan keluarga Kesultanan Bima.

Elemen lain yang terlibat dalam permainan Ferry di pemilukada Bima 2010 adalah birokrasi.⁴⁵ Melalui program bulan bakti gotong royong (BBGR), birokrasi sebagai alat negara digunakan Ferry untuk membantu meningkatkan popularitasnya. BBGR adalah program milik pemerintah yang dilaksanakan mendekati kampanye pemilukada. Selain itu, melalui otoritasnya sebagai *petahana*, Ferry bisa dengan bebas melakukan

penggeseran birokrasi yang dianggap tidak loyal dengannya.⁴⁶

Cara lain yang digunakan Ferry untuk mendulang suara adalah melalui program pengerasan jalan hingga ke pelosok-pelosok desa. Dengan menggandeng pengusaha Tionghoa, Ferry memainkan APBD untuk program pengerasan jalan ini. Tender seolah-olah dibuat sesuai prosedur, namun pilihan akhir tetap jatuh pada kelompok yang memiliki kedekatan dengan Ferry. Spesifikasi juga dibuat khusus hingga hanya perusahaan jasa konstruksi tertentu yang bisa memenuhi standar tersebut.⁴⁷

Ada banyak keuntungan yang Ferry dapatkan dari program pengerasan jalan ini. Pengerasan jalan secara fisik meninggalkan jejak keberhasilan di mata masyarakat terutama yang berada di pelosok. Selama penulis tinggal di Bima, terdapat banyak wilayah yang didominasi oleh jalanan yang terjal, berkelok-kelok, dan longsor. Makanya program pengerasan jalan begitu mengena bagi masyarakat di sana. Program ini juga menjadi modal bagi Ferry untuk menyalurkan ‘logistik’ dalam pemilukada 2010.

Pilihan untuk memindahkan ruang politik dari dalam ke luar membawa implikasi yang cukup besar dalam kehidupan politik di Indonesia.⁴⁸ Jika dahulu kompetisi kekuasaan politik di tingkat daerah dapat diselesaikan di dalam ruangan maka sekarang pilihannya diselesaikan di jalanan. Hal ini di satu sisi memberi jaminan pengakuan hak rakyat dalam berdemokrasi, namun di sisi lain biaya yang harus disediakan untuk menyelenggarakan hajatan ini menjadi sungguh luar biasa mahal. Elite lokal yang bertarung harus memiliki cukup modal jika ingin ikut dalam perhelatan ini. Ferry sebagai *petahana* juga tidak kalah cerdas dalam mengumpulkan modal bagi kampanye pemilukada ini. Berbekal otoritas yang dimilikinya, dia mampu menge-

⁴³ Dia ikut mencalonkan diri dalam pemilukada Bima 2010. Pada tahun 2005 posisinya adalah Ketua KPUD Bima. Ada dua kemungkinan yang terjadi mengenai ijazah palsu ini. Pada tahun 2005, Sukirman Aziz memang tidak mengetahui soal ini ataukah dia mengetahui dan pura-pura tidak tahu. Di tahun 2010 ketika dia menjadi kompetitor Ferry maka dia gunakan senjata ini untuk menjatuhkan nilai Ferry di mata pemilihnya.

⁴⁴ Wawancara Yogi Setya P. dan Pandu Yuhsina A. dengan Pemimpin harian 29 April 2011.

⁴⁵ Wawancara Yogi Setya P. dan Pandu Yuhsina A dengan Pemimpin harian *Bima Ekspres* 29 April 2011. Pemimpin Redaksi harian lokal *Bima Ekspres* (BIMEKS) mengatakan bahwa dia mendapat banyak temuan pengerahan PNS untuk kepentingan kampanye.

⁴⁶ Hasil wawancara tim dengan masyarakat di Wera 2 Mei 2011 bahwa salah satu anggota keluarganya terpaksa dibuang di Kecamatan Tambora hanya karena suaminya menghadiri undangan kampanye calon pasangan di luar Fersy.

⁴⁷ Wawancara Septi Satriani, Yogi Setya Permana, dan Pandu Yuhsina Adaba dengan Sekretaris Gapensi, salah satu anggota DPRD dari Fraksi PKS dan pemimpin redaksi *Stabilitas di Bima*, 26 April 2011.

⁴⁸ Leo Agustino, *Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

luarkan SK tambang sebagai ATM hidup bagi dirinya. Akibatnya liberalisasi SDA (tambang) menjadi tidak terelakkan.⁴⁹

Kasus liberalisasi SDA ini menjadi sorotan masyarakat. Pencabutan SK tambang yang diberikan pada PT Sumber Mineral Nusantara pada awal tahun 2012 adalah buntut dari ketidakpuasan masyarakat dan elite kompetitor Bupati Bima dalam proses pemilukada 2010. Ketidakpuasan warga di Kecamatan Lambu dipicu oleh keresahan warga atas sumber air bersih utama yang berada di dekat lokasi tambang milik PT SMN tersebut. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses penerbitan SK ini minimal dalam bentuk komunikasi atau sosialisasi.⁵⁰ Ketidakpuasan ini sebenarnya telah dikomunikasikan melalui prosedur formal kepada Ferry tetapi ditanggapi dingin oleh Ferry. Tidak diindahkannya protes warga ini berbuntut pada pembakaran kantor Kecamatan Lambu pada awal tahun 2011 dan kerusuhan di pelabuhan Sape maupun pembakaran kantor Bupati Bima di penghujung tahun 2011.

Dari sedikit uraian di atas terlihat bahwa relasi yang dibangun oleh Ferry dan jaringannya hanya sebatas sebagai alat untuk mengamankan posisi kekuasaannya. Sementara elite lokal lain yang memilih untuk berseberangan dengan Ferry lebih karena luapan kekecewaan sebagai akibat tidak dilibatkannya mereka dalam jalur 'keistimewaan' yang dibangun oleh Ferry. Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa kompetisi elite lokal di Bima untuk menduduki kekuasaan politik formal bertujuan tidak lain untuk mendapatkan benefit bagi diri dan kelompoknya. Posisi bupati ini dianggap mampu memberi dasar secara legal untuk 'memainkan' peran atas berbagai sumber daya yang ada di sana. Pembajakan elite jelas terlihat dalam praktik pemilukada Bima 2010. Hal ini terjadi tidak lepas dari karakter kekuasaan yang mendasarkan pada politik kedekatan dan kekerabatan.

Refleksi

Di satu sisi, demokratisasi dan desentralisasi membawa peralihan bagi tradisi dan kultur politik di Indonesia yang otoritarian ke sistem politik yang mengakomodasi hak warga negara untuk berpartisipasi. Akan tetapi, di sisi lain, desentralisasi dan demokratisasi juga membuka ruang yang lebar bagi beragam kepentingan untuk ikut menentukan cara pembagian kekuasaan maupun sumber daya.⁵¹ Asumsi awal yang dibangun dari pengakomodasian hak warga negara untuk berpartisipasi adalah terwujudnya *good governance*. Namun, asumsi ini harus tersisihkan oleh kemunculan praktik-praktik penyelewengan kekuasaan, manipulasi dana, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kecenderungan terjadinya kekerasan.

Gambaran di atas adalah potret demokrasi lokal yang menyuguhkan paradoks. Tujuan awal dari dilaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperluas partisipasi politik warga melalui pemilukada, justru memperlihatkan terjadinya mobilisasi politik oleh kelompok elite tertentu untuk kepentingan pribadinya. Pemilu dan pemilukada secara prosedural memang telah berjalan. Namun, pemilukada sebagai salah satu manifestasi demokrasi lokal dan implementasi otonomi daerah tak ubahnya resentralisasi di tingkat lokal karena pada kenyataannya hanya para oligarki yang memiliki modal ekonomi-politik yang besar yang mampu mengendalikan prosesi demokrasi di tingkat lokal. Sementara masyarakat hanyalah sebagai pelengkap penderita dan sering kali diposisikan hanya sebagai "suporter", bukan "voter" yang sesungguhnya.⁵²

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2009. *Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Dewi Fortuna. 2009. "Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Mendorong dan Menghambat Demokratisasi" dalam R. Siti Zuhro (Ed.). *Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.

⁴⁹ Vedi R Hadiz, *op.cit.*

⁵² Lihat dalam laporan tim di Bab 5 yang ditulis oleh Irine Hiraswari Gayatri dan Bab 6 yang ditulis Septi Satriani dkk., *Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima 2010*, (Jakarta: LIPI Press, 2011).

⁴⁹ Hasil FGD Tim Evaluasi Format Pemilukada Pusat Penelitian Politik LIPI dengan beberapa narasumber dari anggota KPU Pusat, Ketua Bawaslu, DEMOS, anggota DPR RI, Ketua MK, Dirjend Otda pada tanggal 25–26 Februari 2012.

⁵⁰ Hasil *hearing* Komnas HAM dengan warga Lambu.

- Amin, Ahmad 1993. "Sedjarah Bima" dalam Tim Peneliti PPW-LIPI, *Penelitian Wawasan Kebangsaan Indonesia (Tataran Masyarakat)*. 1993. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Bima dalam Angka 2011.
- Chambert-Loir, Henri dkk. 2010. *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*. Jakarta: KGP.
- Chambert-Loir, Henri dan Siti Maryam R. Salahuddin. 1999. *Bo' Sangaji Kai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi, Tinjauan Berbagai Perspektif*. Jakarta: LP3ES.
- Haris, Syamsuddin dalam Tim Peneliti PPW-LIPI, *Penelitian Wawasan Kebangsaan Indonesia (Tataran Masyarakat)*. 1993. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford California: Stanford Press.
- <http://bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=6>
- <http://jejakbulikts.com/readnews.php?id=275>
- <http://nasional.vivanews.com/news/read/283195-motor-wartawan-dibakar-demonstran-di-bima>
- <http://mediagardaasakota.blogspot.com/2011/07/massa-dji-sam-su-gelar-aksi-keliling.html>
- <http://tv.liputan6.com/main/read/6/1035332>
- http://berita.liputan6.com/read/290448/pelantikan_bupati_bima_ricuh
- KPUD Kabupaten Bima.
- Mietzer, Marcus. 2011. "Funding Pemilukada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Elections", dalam Edward Aspinall dan Gerry Van Klinken. *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV.
- Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010.
- Tayeb, Abdullah. 1995. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT Harapan Masa PGRI.
- Thubany, Syamsul Hadi. 2005. *Pemilukada Bima 2005: Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia*. NTB: Bina Swagiri-Fitra Tuban-Solud NTB Kemitraan.
- Satriani, Septi dkk. 2012. *Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Bima 2010*. Jakarta: LIPI Press.
- _____. *Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus di Sumbawa*. 2010. Jakarta: LIPI Press.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.